

Saatnya Mengembangkan (Lagi) *Community Based Development* di Kawasan Pesisir Indonesia

Hendro Prabowo ¹, Maharyantari P. Dewi ², Henny Regina Salve ³, Agung Wahyudi ⁴

^{1,2,3} Psikologi Komunitas, Fakultas Psikologi, Universitas Gunadarma.

⁴ Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Gunadarma.

Email korespondensi: henny_r@staff.gunadarma.ac.id

Abstrak

Sebagai negara kepulauan (13.446 pulau) dan memiliki panjang garis pantainya nomor dua di dunia setelah Kanada atau 99.093 kilometer atau, diperkirakan 60% dari penduduk Indonesia hidup dan tinggal di wilayah pesisir. Dewasa ini terdapat 16 proyek reklamasi pantai di seluruh wilayah Indonesia, namun pengembangan reklamasi di Indonesia ini harus berhadapan dengan masyarakat nelayan yang sudah menghuni dalam waktu yang lama di kawasan pesisir tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan masalah pengembangan lingkungan binaan yang dilakukan di wilayah pesisir di Indonesia. Dengan mengambil tiga wilayah yaitu Jakarta, Makassar, dan Bali. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka melalui scholar.google.com dan Studi Media, penelitian ini menemukan tidak adanya keterlibatan masyarakat lokal pada pengembangan reklamasi. Masyarakat lokal justru termarginalisasikan secara sosial, ekonomi, dan budaya.

Kata-kunci : lingkungan binaan, pesisir, reklamasi

Pengantar

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki 13.446 pulau dan panjang garis pantainya adalah 99.093 kilometer atau nomor dua di dunia setelah Kanada. Selain itu, diperkirakan 60% dari penduduk Indonesia hidup dan tinggal di wilayah pesisir. Sekitar 9.261 desa dari 64.439 desa yang ada di Indonesia dapat dikategorikan sebagai desa atau permukiman pesisir. Kebanyakan dari mereka merupakan masyarakat tradisional dengan kondisi sosial ekonomi dan latar belakang pendidikan yang relatif sangat rendah. Sekitar 90%, mereka berpendidikan hanya sampai sekolah dasar. Kota-kota besar di Indonesia, sebagian besar juga berada di wilayah pesisir. Sangat niscaya jika lahan di kawasan pesisir yang berfungsi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, dan sekaligus menjadi pilihan upaya mitigasi bencana akibat perubahan iklim atau ancaman bencana. Untuk itu, reklamasi adalah pilihannya karena kota-kota pesisir di dunia juga sudah melakukannya.

Kota-kota di dunia yang mengembangkan reklamasi yang umumnya di wilayah dengan penduduk yang tidak terlalu padat atau memanfaatkan lahan tanpa penghuni. Di kota Dubai, Uni Emirat Arab terdapat proyek reklamasi Palm Jumeirah yang merupakan yang terpisah dari daratan. Dengan makin menipisnya cadangan minyak dan kurangnya sumber daya, maka reklamasi dikembangkan untuk menarik wisatawan asing. Reklamasi Belanda diberi nama proyek Port of Rotterdam, dimana pelabuhan hasil reklamasi proyek Maaksvlakte 1 telah mencapai kapasitas maksimum,

sehingga dibuka proyek Maasvlakte 2 yang menghasilkan pelabuhan baru yang sudah diberdayakan untuk kepentingan komersial sejak tahun 2013. Wilayah Maasvlakte dulunya adalah wilayah gundukan pasir yang berbahaya untuk hunian maupun untuk aktivitas pelabuhan. Reklamasi di Hongkong dikembangkan di wilayah Tung Chung yang semula hanyalah pulau terpencil dan sepi penghuni. Lewat reklamasi di sebelah utara, timur, dan timur laut Hongkong seluas 14 hektar, Tung Chung kini berubah wajah menjadi kota baru dengan magnet utamanya bandara internasional Hongkong dan wisata belanja. Area Tung Chung saat ini menjadi salah satu tujuan wisata utama di Hongkong.

Reklamasi di Singapura dikembangkan dengan nama Pulau Sentosa. Pulau ini dulunya dikenal sebagai Pulau Blakang Mati yang kemudian digabungkan dengan pulau-pulau kecil sekitarnya. Pulau Blakang Mati adalah pulau tak berpenghuni karena konon merupakan tempat berkumpulnya para bajak laut. Setelah reklamasi, Pulau Sentosa ini menjadi pusat wisata yang menawarkan berbagai macam fasilitas hiburan seperti hotel, taman, villa, dan arena permainan.

Berbeda dengan negara-negara lain di dunia, pengembangan reklamasi di Indonesia di antaranya harus berhadapan dengan masyarakat nelayan yang sudah menghuni dalam waktu yang lama di kawasan pesisir. Dewasa ini, di Indonesia terdapat 16 proyek reklamasi pantai, yaitu Teluk Jakarta; Pantai Swering, Ternate, Maluku Utara; Pantai Marina, Semarang, Jawa Tengah; Pesisir Manado, Sulawesi Utara; Teluk Benoa, Badung, Bali; Pantai Balikpapan, Kalimantan Timur; Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan; Pantai Talise, Palu, Sulawesi Tengah; Pantai Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur; Pesisir Lamongan, Lamongan, Jawa Timur; Pulau Serangan, Denpasar, Bali; Pantai Bitung, Manado, Sulawesi Utara; Pantai Tanjung Merah, Manado, Sulawesi Utara; Pantai Boulevard Manado, Sulawesi Utara; Teluk Tangerang, Banten; dan Teluk Kupang, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tiga proyek reklamasi yang harus berhadapan dengan masyarakat nelayan di Indonesia pada tulisan ini adalah Teluk Jakarta, Pantai Losari Makassar, dan Teluk Benoa Bali.

Pengembangan Reklamasi dan Keterlibatan Masyarakat Lokal

Tujuan penulisan atau obyek penulisan ini adalah untuk menjawab pertanyaan apakah pengembangan reklamasi di tiga wilayah di Indonesia (Jakarta, Makassar, dan Bali) melibatkan komunitas setempat? Untuk itu, penulis melakukan studi pustaka dan studi media untuk wilayah pengembangan reklamasi Jakarta, Makassar, dan Bali. Studi pustaka dilakukan melalui bantuan scholar.google.com dengan kata kunci: reklamasi Jakarta, reklamasi Makassar, dan reklamasi Bali. Sementara untuk studi media dilakukan melalui google.com dengan kata kunci protes reklamasi Jakarta, protes reklamasi Makassar, dan protes reklamasi Bali. Metode observasi langsung juga dilakukan di wilayah reklamasi Jakarta. Setelah data terkumpul, analisis data dilakukan dengan analisis tematik, dimana tema-tema yang serupa pada kasus ketiga tersebut lalu dianalisis, hasilnya disajikan berdasarkan kota.

Diskusi

Reklamasi Teluk Jakarta

Teluk Jakarta adalah wilayah yang membentang dari Tanjung Pasir (Kabupaten Tangerang) di sebelah barat sampai Tanjung Karawang (Kabupaten Bekasi) di sebelah timur. Luas wilayahnya 285 km², dengan garis pantai sepanjang 33km. Teluk Jakarta juga memiliki gugusan kepulauan yang bernama Kepulauan Seribu, yang merupakan tempat wisata bahari. Beberapa kampung nelayan yang sudah lama mendiami wilayah ini antara lain adalah Kamal Muara, Muara Angke, Muara Baru,

Kampung Luar Batang, Marunda Pulo, dan Cilincing. Umumnya, kampung-kampung ini dihuni oleh nelayan dari suku Jawa (Indramayu), Bugis, dan Betawi.

Para nelayan di Teluk Jakarta, pada umumnya adalah pembudidaya atau peternak kerang hijau, penangkap ikan dengan *bagan*, dan penangkap ikan dengan perahu berjarak pendek. Acapkali mereka juga menjadi pengantar wisatawan untuk memancing dan berkunjung ke Kepulauan Seribu. Pada tahun 2014, pengembangan reklamasi Teluk Jakarta yang mencakup 17 pulau dari barat sampai timur. Reklamasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah pengikisan daratan Jakarta oleh air laut; menata kembali kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) dengan cara membangun kawasan pantai; menjadikan Jakarta sebagai kota pantai (*waterfront city*); dan menjadi ruang bagi pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta Utara yang berpotensi membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sehingga mengurangi angka pengangguran. Namun, keberadaan pulau-pulau reklamasi ini menjadikan nelayan menjadi merugi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain berkurangnya wilayah tangkapan ikan, hilangnya lahan untuk beternak kerang hijau dan *bagan*. Jika akan melaut, para nelayan juga harus berputar sehingga memakan biaya bahan bakar yang lebih dari biasanya. Secara ekonomi, beberapa akademisi mengestimasi total kerugian secara keseluruhan yang dirasakan oleh nelayan akibat aktivitas reklamasi adalah sekitar Rp207.153.292.610/tahun, yang disebabkan karena kerugian pembudidayaan tambak dan kerugian pembudidayaan kerang hijau. Luas daerah penangkapan dan budidaya kerang hijau (*Perna Viridis*) yang terdampak langsung dari kegiatan reklamasi mencapai 1.527,34 Ha. Jumlah nelayan yang menetap di Teluk Jakarta mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2018, jumlah nelayan di wilayah ini hanya mencapai 8.000 orang, padahal di tahun 2010 jumlah mereka 15.000 orang.

Berbagai macam kerugian yang dialami oleh nelayan ini dirasakan pula oleh para aktivis dan akademisi. Para aktivis dan akademisi bersatu dengan nelayan dalam melakukan tindakan kolektif demi menolak reklamasi teluk Jakarta. Gerakan aksi penolakan reklamasi melibatkan organisasi non pemerintah skala nasional seperti KSTJ (Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta) dan merupakan gabungan dari organisasi berbasis nasional seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH Jakarta), Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Solidaritas Perempuan (SP), dan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Selanjutnya, ditingkat lokal terdapat koalisi yang disebut dengan AKAR (Aliansi Korban Reklamasi) yang merupakan gabungan dari organisasi dan paguyuban nelayan seperti Forum Komunikasi Nelayan (FKN), Serikat Nelayan Tradisional (SNT), dan Koalisi Nelayan Tradisional (KNT).

Sejumlah aksi protes telah dilakukan pada tahun 2017–2018, antara lain :

1. Sejumlah LSM seperti Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) bersatu menolak reklamasi teluk Jakarta, karena dianggap melanggar Undang-Undang dan memperparah kondisi DKI Jakarta.
2. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) melakukan aksi damai secara simbolis dengan menyegel Pulau G.
3. Nelayan melakukan aksi simbolis sujud syukur atas diterimanya gugatan pembatalan reklamasi pulau F dan K setelah Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menang gugatan pembatalan Pulau F, I, dan K.
4. Ketika Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meneruskan pembangunan pulau reklamasi C, D, dan G, perwakilan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) melaporkan terkait pencabutan moratorium.
5. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menolak dilakukannya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta Raperda rencana Tata Ruang.
6. Ketika Menko Kemaritiman mengeluarkan Surat Menko Maritim tentang pencabutan penghentian sementara (moratorium), Aliansi Korban Reklamasi (AKAR) melakukan dua

aksi. Pertama, AKAR melakukan aksi demonstrasi di Balaikota menuntut menolak reklamasi dan penolakan terhadap pencabutan moratorium. Kedua, AKAR juga mendaftarkan gugatan ke PN Jaksel yang ditunjukkan ke PT KNI dan Sekda DKI Jakarta atas tuduhan melawan hukum.

7. Pemerintah Provinsi DKI menandatangani Pergub tentang Badan Pengelola Reklamasi, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) mengancam keras tindakan Gubernur Anies yang mengeluarkan Pergub tersebut.

Pantai Losari Makassar

Kota Makassar merupakan wilayah pesisir yang memiliki areal seluas 175.77 kilometer persegi dengan panjang pesisir mencapai $\pm 35,52$ km. Sebanyak 4 kelurahan yang berada di Kecamatan Ujung Pandang merupakan wilayah pesisir termasuk Pulau Lae-Lae yang terletak beberapa mil dari Pantai Losari. Kawasan Pantai Losari merupakan kawasan wisata yang memiliki banyak tujuan wisata seperti Pantai Losari, Benteng Fort Rotterdam, Pusat Perbelanjaan Somba Opu, dan kawasan wisata kuliner. Di kota Makassar ini, dua proyek reklamasi dibangun dengan nama Tanjung Bunga dan Centre Point of Indonesia (CPI). Setelah Tanjung Bunga selesai dibangun, reklamasi dilanjutkan di pesisir kota Makassar, letaknya di wilayah Pantai Losari. Luas rencana reklamasi pada Kawasan Strategis Terpadu CPI yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki luas 625,35 hektar di zona kawasan inti dan 840,75 hektar di kawasan penyangga. Tanah urukan berupa pasir putih yang digunakan dalam pengembangan reklamasi ini diambil dari wilayah Pantai Galesong (yang berjarak 10 km dari Pantai Losari), Pulau Tanakek dan Pulau Sanrobone, di Kabupaten Takalar.

Ternyata, pembangunan reklamasi ini berjalan lambat karena adanya pro kontra terhadap reklamasi. Beberapa akademisi menemukan bahwa reklamasi di Pantai Losari dan Tanjung Bunga kota Makassar tidak berdampak pada perubahan sosial ekonomi masyarakat setempat kecuali kenaikan harga tanah. Sementara pembangunan reklamasi CPI menyisahkan cerita pengusiran nelayan secara paksa tanpa kompensasi. Sebelumnya pencemaran air laut berupa air menghitam dan beraroma tidak sedap dari banyaknya sampah, berimbas pada menurunnya kuantitas dan kualitas biota laut seperti ikan, kerang, kepiting yang biasanya menjadi sumber perekonomian nelayan. Akibatnya, proyek reklamasi CPI berakibat berkurangnya wilayah tangkap ikan serta rusaknya lingkungan sekitar area penangkapan ikan, menyebabkan nelayan tidak lagi leluasa melakukan aktivitasnya, wilayah tangkapan semakin jauh, sehingga modal yang dibutuhkan untuk melaut menjadi lebih tinggi dan telah mengubah jadwal melaut mereka.

Sebagai bentuk protes, beberapa aksi telah dilakukan di sepanjang tahun 2016–2019, antara lain :

1. Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Makasar melakukan aksi orasi dan pengumpulan tanda tangan, memanfaatkan acara *car free day* di Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan.
2. Sejumlah lembaga non pemerintah yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) melakukan aksi penolakan program reklamasi pantai di anjungan Pantai Losari, Makassar. Mereka menolak rencana pembangunan kawasan terpadu pusat bisnis yang sebagian besar direncanakan di dalam areal reklamasi Pantai Losari.
3. Kunjungan Komisi IV DPR di lokasi reklamasi kawasan Pantai Losari Makassar dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan Pulau Lae-Lae dan aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan menyuarakan penolakannya terhadap reklamasi pantai, karena telah merusak mata pencaharian mereka sebagai nelayan.
4. Pengerukan pasir yang dilakukan perusahaan asal Belanda, Royal Boskalis, di Pulau Tanakek dan Sanrobone, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, mendapat kecaman

dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Kecamatan muncul, karena pengerukan tersebut akan merusak ekosistem di sekitar perairan Takalar yang menjadi lokasi pengerukan.

5. Ratusan warga Galesong, Kabupaten Takalar, berbondong-bondong ke Kota Makassar menumpang puluhan perahu jolloro untuk melakukan aksi demonstrasi menolak penambangan pasir putih untuk kepentingan reklamasi Pantai Losari
6. Nelayan melakukan aksi dengan menggunakan perahu menuju kantor pengembang kawasan Center Point of Indonesia (CPI) di Makassar. Kawasan CPI yang lahannya mereklamasi laut tersebut dikecam oleh nelayan karena dianggap mengurangi wilayah tangkapan dan akses dari perkampungan ke laut.

Reklamasi Teluk Benoa

Dua proyek reklamasi di Bali adalah Pulau Serangan awal tahun 1990-an dan rencana reklamasi Teluk Benoa tahun 2010-an. Reklamasi yang kedua ini direncanakan dengan batas yaitu pada bagian utara berbatasan dengan Pelabuhan Laut Benoa, pada bagian timurnya berbatasan dengan Desa Tanjung Benoa dan Desa Tengkulung, pada bagian selatan berbatasan dengan Desa Bualu, dan pada bagian baratnya berbatasan dengan Desa Jimbaran serta Pulau Pudut yang menjadi salah satu kawasan suci masyarakat Bali.

Masyarakat desa adat di Bali dengan tegas menolak kegiatan reklamasi Teluk Benoa, dimana telah ada 39 desa adat di Bali yang menolak reklamasi Teluk Benoa. Sejumlah desa adat yang menolak adalah desa adat Tanjung Benoa, Jimbaran, Kelan, Kuta, Bualu, Kedongan, Kerobokan, Sesetan, Kepaon, Pedungan, Pemogan, Sumerta, Serangan, dan desa adat lainnya. Semua desa adat yang menolak reklamasi Teluk Benoa membuat pernyataan sikap mengenai penolakan reklamasi Teluk Benoa. Hal ini karena reklamasi yang didukung pemerintah Provinsi Bali ditolak ini amat berkaitan dengan konsep "*Tri Hita Karana*". Rencana reklamasi juga dianggap melanggar nilai-nilai pelestarian kawasan perairan teluk serta akan berdampak buruk pada daratan di Bali Selatan seperti kenaikan air laut. Selain itu, reklamasi Teluk Benoa dikhawatirkan akan merusak 70 titik tempat yang dianggap suci oleh masyarakat Hindu Bali, dimana beberapa kawasan suci ini berkaitan erat dengan kegiatan spiritual, sosial, dan budaya masyarakat Bali.

Bagi masyarakat Hindu di Bali, laut (dan terkait dengan gunung) adalah sumber kehidupan sekaligus tempat yang disakralkan. Konsep penghormatan terhadap laut berasal dari konsep *Nyegara-Gunung* (Laut-Gunung), suatu konsep tata ruang dalam budaya Bali. Gunung sebagai perwujudan "*Lingga*" adalah tempat bersemayamnya "*Dewa Siwa*". Sedangkan lautan sebagai perwujudan "*Yoni*" adalah tempat bersemayam saktinya Siwa. *Lingga-Yoni* adalah simbolis *Purusa-Pradana* (laki-laki dan perempuan). *Nyegara-Gunung* adalah keseimbangan spritual alami yang berorientasi kepada gunung dan lautan, *luan-teben* (atas/hulu dan bawah/hilir), *sekala-niskala* (suci-tidak suci), *rwa bhineda* (baik dan buruk), dan sebagainya. *Nyegara-Gunung* juga merupakan upacara umat Hindu di Bali yang memiliki makna bahwa laut dan gunung adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika laut maupun gunung rusak maka akan merusak keseimbangan dalam kebudayaan Bali secara keseluruhan. Upacara *Nyegara Gunung* pelaksanaannya biasanya di tepi pantai atau segara (laut), hal ini dikarenakan laut memiliki makna filosofis sebagai segara yang merupakan sumber kehidupan.

Salah satu contoh lain yang berhubungan dengan laut adalah upacara *ngaben*. Laut adalah elemen penting dalam ritual pemakaman *ngaben*, karena abu jenazah orang yang telah meninggal (dalam prosesi ritual *ngaben*) lalu akan dilarung di laut. Upacara *nganyud* memiliki makna sebagai ritual untuk menghanyutkan segala kekotoran yang masih tertinggal dalam roh mending dengan

simbolisasi berupa menghanyutkan abu jenazah. Upacara ini biasanya dilakukan di laut, atau sungai. Jika reklamasi dilakukan, maka akan ada wilayah-wilayah pantai yang dimiliki oleh sektor swasta, sehingga masyarakat harus memiliki izin khusus untuk memasukinya. Hal ini akan menimbulkan mempersulit ritual *ngaben* tersebut bagi masyarakat Bali setempat. Jikalau pun harus berpindah ke pantai lainnya, tentu lokasinya lebih jauh untuk melakukan ritual tersebut dan akan memberikan beban biaya pada masyarakat adat.

Salah satu kegiatan menolak reklamasi Teluk Benoa yang sedianya akan dilaksanakan oleh PT TWBI (PT Tirta Wahana Bali International) adalah kegiatan aksi protes dari massa yang tergabung dalam Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) di depan kantor pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 29 Januari 2016. Massa yang beranggotakan ribuan orang tersebut berharap pemerintah provinsi dan daerah di Bali menolak rekomendasi AMDAL untuk menghindari konflik yang lebih besar. Pemerintah pusat juga diminta untuk menghormati aspirasi rakyat. Penolakan ini terjadi karena kawasan Teluk Benoa yang akan menjadi tempat reklamasi memiliki 70 kawasan suci umat Hindu di Bali. Kegiatan demo hampir rutin dilakukan setiap minggu untuk menyuarakan penolakan masyarakat terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa. Dalam rentang waktu tersebut, warga desa adat, *prajuru* (pengurus desa adat), dan *bendesa* (pemimpin desa adat) sudah mengetahui kontroversi itu dari media massa. Identitas mereka sebagai warga desa adat dan sebagai orang Bali menjadi mengemuka dan kemudian bergabung dalam gerakan aksi untuk menolak reklamasi Teluk Benoa. Tindakan kolektif warga gabungan dari berbagai desa adat untuk menolak reklamasi Teluk Benoa mulai terlihat pada tanggal 29 Januari 2016 ketika massa gabungan dan sejumlah desa adat di pesisir Teluk Benoa melakukan demonstrasi saat berlangsungnya konsultasi publik tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) reklamasi Teluk Benoa.

Keterlibatan desa adat di Bali dalam gerakan penolakan reklamasi Teluk Benoa yang mulai berproses secara sporadis sejak tahun 2013 merupakan fenomena yang penting dalam perubahan desa adat di Bali. Sebelumnya tidak pernah terjadi desa-desa adat di Bali berkoalisi untuk masuk dalam aksi sosial. Sebagai lembaga sosial religius, desa adat secara tradisi lebih berorientasi internal untuk mengurus urusan adat di wilayahnya masing-masing. Kerja sama antar desa adat biasanya terkait dengan penyelenggaraan upacara agama di Pura-Pura besar yang dikelola oleh gabungan desa-desa adat di sekitar pura tersebut. Pasca aksi antar desa adat pada tanggal 29 Januari 2016, desa-desa adat yang menolak reklamasi Teluk Benoa kemudian membuat wadah organisasi yaitu Pasubayan yang terbentuk pada tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016, Pasubayan sudah mencakup 39 desa adat. Pasubayan juga memiliki anggota dari desa-desa adat yang tidak memiliki batas wilayah dengan Teluk Benoa. Reklamasi Teluk Benoa tidak semata-mata dilihat sebagai pencemaran kesucian terhadap wilayah desa adat yang memiliki wilayah terkait dengan rencana reklamasi Teluk Benoa, namun dapat dilihat sebagai pencemaran terhadap kesucian tanah Bali pada umumnya. Melalui kepercayaan tersebut, desa adat yang berada di luar wilayah Teluk Benoa pun merasa memiliki kepastasan untuk membela kesucian dari teluk tersebut.

Saatnya *Community Based Development* untuk Wilayah Pesisir

Meskipun tidak dapat menghentikan proyek reklamasi atau hanya menghambat proses pembangunannya, namun aksi protes yang dilakukan di tiga wilayah di atas memiliki dua kesamaan. Pertama, aksi protes dilakukan karena proyek pengembangan reklamasi memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Kedua, keterlibatan pihak selain kelompok nelayan yang berasal dari organisasi non pemerintah dan akademisi. Kelompok-kelompok ini ikut merasakan penderitaan yang dialami para nelayan atau masyarakat pesisir yang terdampak langsung dari proyek reklamasi. Bahkan dalam kasus Teluk Benoa, para nelayan tidak begitu terlihat dalam aksi protes karena banyaknya elemen masyarakat yang terlibat dalam aksi menolak reklamasi Teluk Benoa.

Secara psikologis, fenomena aksi protes merupakan bagian dari teori identitas sosial, yang beranggapan bahwa orang pada umumnya berjuang untuk mendapat manfaat dari identitas sosial positif yang terkait dengan kelompok mereka. Satu-satunya cara bagi anggota dalam untuk mendapatkan identitas sosial yang positif adalah dengan mengidentifikasi dirinya dengan kelompok-kelompok dimana mereka dapat dikategorikan, dan kemudian memastikan bahwa kelompok mereka itu adalah yang terbaik dalam satu-satunya perbandingan yang tersedia di antara kelompok-kelompok ada yang lalu menjadi pembeda antara *in-group* dan *out-group*. Orang-orang yang berpartisipasi dalam aksi protes adalah untuk mengungkapkan keluhan mereka yang berasal dari adanya perampasan, frustrasi, ketidakadilan, atau adanya perbandingan sosial pada situasi yang tidak menyenangkan. Identitas *in-group* adalah masyarakat nelayan yang dirugikan dalam proyek reklamasi yang lalu berekskalasi menjadi lebih besar karena keterlibatan beragam kelompok lain. Kelompok *in-group* ini harus berhadapan dengan kelompok *out-group* yang dianggap merugikan, yaitu pemerintah dan pengembang.

Selain kesamaan, terdapat pula perbedaan terutama pada kasus Teluk Benoa yang melibatkan masyarakat adat dalam aksi protes. Bahkan, masyarakat adat di luar wilayah terdampak juga ikut terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa masalah reklamasi Teluk Benoa telah memicu identitas ke-Bali-an masyarakat adat yang tidak terdampak. Identitas budaya sendiri menurut Myron Lustig mengacu pada rasa memiliki seseorang terhadap budaya atau kelompok tertentu. Proses ini melibatkan pembelajaran tentang menerima tradisi, warisan, agama, estetika, pola pikir, dan struktur sosial suatu budaya. Biasanya, orang menginternalisasi kepercayaan, nilai, norma, dan praktik sosial budaya mereka dan mengidentifikasi diri mereka dengan budaya itu. Budaya lalu menjadi bagian dari konsep diri mereka. Hal yang berbeda dengan kasus di Makassar dan Jakarta, dimana aksi protes lebih menjurus pada ikatan sosial ekonomi.

Jadi, pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) harus berhati-hati jika ingin mengembangkan proyek reklamasi di wilayah-wilayah yang berpenghuni di wilayah lain di Indonesia. Pemerintah bakal berhadapan dengan para nelayan, organisasi non pemerintah, akademisi maupun kelompok adat yang akan menghadangnya. Kecuali, proyek reklamasi akan dikembangkan di wilayah tak berpenghuni seperti di Belanda, Singapura, dan Hongkong. Atau melibatkan para nelayan dalam perencanaan yang lebih partisipatori dan terintegrasi dengan komponen perencanaan lainnya. Lebih manusiawi, jika para nelayan juga dijadikan aktor penentu dalam pembangunan reklamasi.

Menurut Cho dan Križnik (2016), pengembangan wilayah perkotaan menjadi semakin terfokus pada masyarakat lokal, yang merupakan langkah penting menuju stabilitas sosial, kesetaraan, dan kohesi sosial kota di masa depan. Pembangunan perkotaan berbasis masyarakat yang mengacu pada transformasi perumahan dan wilayah perkotaan lainnya, dimana tujuan utamanya adalah tidak hanya untuk meningkatkan lingkungan binaan tetapi juga untuk mempertahankan dan memperkuat kehidupan komunal dan identitas bersama di daerah-daerah ini. Untuk itu, partisipasi aktif penduduk dalam perencanaan dan manajemen, serta dalam proses pengambilan keputusan, sangat penting untuk pembangunan perkotaan berbasis masyarakat yang berhasil. Partisipasi ini dimaksudkan sebagai instrumen perencanaan utama untuk mengembangkan modal sosial dan kohesi sosial di wilayah, serta untuk meningkatkan rasa masyarakat penduduk (Putnam 2000).

Pembangunan perkotaan yang berbasis masyarakat dalam membentuk lingkungan binaan, menjadi jelas di Benua Asia. Banyak inisiatif akar rumput bermunculan, yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara warga lokal dan lingkungan binaan, yang diduga hilang di masa lalu. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan untuk menjadi aktif dalam melibatkan warganya dalam perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan, memberi mereka insentif kebijakan dan dukungan

kelembagaan untuk perencanaan yang kolaboratif. Misalnya, di Taiwan dan Hong Kong, dimana masyarakat lokal diketahui secara aktif menggunakan hak-hak mereka dalam membentuk lingkungan hidup mereka. Di Hong Kong, pembangunan di Ngau Tau Kok telah menggunakan perencanaan partisipatif dalam pembangunan kembali perumahan, yang menimbulkan dukungan dan rasa kepemilikan penduduk. Di Taipei, masyarakat setempat telah menjadi mitra aktif untuk inisiatif pemerintah daerah. Di Seoul, masyarakat lokal bersama dengan organisasi masyarakat sipil telah terlibat dalam berbagai masalah perkotaan, seperti hak-hak perumahan atau pembangunan masyarakat dan berkontribusi pada reformasi kelembagaan yang secara aktif berusaha untuk menyelaraskan masyarakat lokal dalam pembangunan perkotaan. Sementara di Singapura, secara bertahap membuka dan mendorong warga untuk memiliki kebijakan yang lebih besar yang secara langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka (Cho & Križnik, 2016).

Menurut Rocharungsat (2008) *community based tourism* di Asia telah berkembang dengan pesat bersamaan dengan kekhawatiran tentang apakah cara ini benar-benar akan menguntungkan masyarakat atau tidak. Meskipun demikian, sebagian besar negara di Asia mendorong dan mendukung bentuk pariwisata ini. Dalam pengembangan pariwisata lokal, proses perencanaan partisipatif masyarakat di Pulau Samui, Thailand. Di sini modal sosial sebagai penggerak dalam berbagai tahapan dapat dianggap sebagai mekanisme penting bagi keberhasilan perencanaan kegiatan pariwisata lokal (Pongponrat & Chantradoan, 2012; Pongponrat, 2013). Selain itu, ekowisata berbasis komunitas juga dikembangkan di Phuket dan AoPhangnga di Thailand Selatan. Manfaat ekowisata di Phuket ini ternyata lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan hal pengembangan masyarakat (Kontogeorgopoulos, 2005). *Community based tourism* juga telah dikembangkan di Indonesia. Misalnya, di Desa Bedulu, Blah Batuh, Gianyar, Bali (Pantiyasa, 2011); kawasan Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah (Sunuantari, 2017); Desa Nglanggeran, Gunungkidul, Yogyakarta (Manaf, Purbasari, Damayanti, Aprilia & Astuti, W2018); Borobudur, Magelang, Jawa Tengah (Arintoko, Ahmad, Gunawan & Supadi, 2020); Pulau Laelae, Makassar, Sulawesi Selatan (Junaid, Sigala & Banchit, 2020).

Adalah Aga Khan Award for Architecture (AKAA) adalah penghargaan arsitektural yang digagas oleh Aga Khan IV pada tahun 1977 yang diberikan untuk memberikan apresiasi terhadap konsep arsitektural yang berhasil menjawab keperluan dan aspirasi masyarakat yang Islami, termasuk di dalamnya pengembangan lingkungan. Di Indonesia, penerima Aga Khan antara lain adalah Kampung Improvement Programme (KIP) di Surabaya yang selesai pada tahun 1981 dan mendapatkan penghargaan pada tahun 1986; Pengembangan Lingkungan Kota Citra Niaga di Samarinda, yang selesai: pada tahun 1986, dan mendapatkan penghargaan pada tahun 1989; dan Kampung Kali Code di Yogyakarta, yang selesai tahun 1985 dan mendapatkan penghargaan pada tahun 1992. Pada proyek-proyek berbasis masyarakat ini lalu dikenal arsitek komunitas seperti Anton Ismael, Johan Silas, dan Y. B. Mangunwijaya. Selain itu, terdapat pula Proyek Eko Damai Mandiri adalah suatu usaha bersama (gotong-royong) dalam mengadakan perumahan bagi masyarakat lokal di Cibogo, Tangerang; melalui suatu wadah koperasi, yang berawal dari rasa kebutuhan akan perumahan oleh salah satu koperasi karyawan yang kemudian tumbuh dan berkembang bersama dengan beberapa koperasi karyawan lainnya dan beberapa orang yang tertarik dan aktif sehingga menjadi suatu gabungan dalam wadah kumpulan koperasi.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan reklamasi pantai di tiga wilayah yaitu Jakarta, Makassar, dan Bali pada dekade 2010-an, ternyata tidak melibatkan partisipasi masyarakat lokal yang telah lama menghuni kawasan yang direklamasi tersebut. Akibatnya, masyarakat lokal menjadi termarginalkan secara sosial, ekonomi dan budaya. Padahal, pendekatan *Community Based Development* (CBD) pada umumnya sudah berkembang di Indonesia sejak akhir 1980an, dan pada *Community Based Tourism* (CBT) pada khususnya sejak 2010-an.

Daftar Pustaka

- Arintoko, A., Ahmad, A. A., Gunawan, D. S., & Supadi, S. (2020). Community-based tourism village development strategies: A case of Borobudur Tourism Village area, Indonesia. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 29 (2), 398–413. DOI:10.30892/gtg.29202-477
- Cho, I. S., & Križnik, B. (2016). *Community-based urban development: Evolving urban paradigms in Singapore and Seoul*. New York: Springer.
- Darmansyah, A., Sudaryono, S., & Swasto, D. F. (2019). Perubahan permukiman nelayan pasca reklamasi pantai Di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso Makassar. *Jurnal Teknosains*, 8 (2), 158-167. <https://doi.org/10.22146/teknosains.37731>
- Dewi, G. S. (2019). Penolakan Masyarakat Terhadap Reklamasi Teluk Benoa Provinsi Bali. *Diponegoro Private Law Review*, 4 (1).
- Harahap, I. H., & Suryana, N. (2019). Urgensi Kebijakan Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta dan Dampak Yang Ditimbulkan. *Tataloka*, 21 (4). DOI: <https://doi.org/10.14710/tataloka.21.4.689-704>
- Hikmah, Zulham, A., & Nasution, Z. (2018). Reklamasi Di Teluk Jakarta Dan Perubahan Sosial Pada Masyarakat Nelayan Di Cilincing Jakarta Utara. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 8 (1), 1-12. DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v8i1.6849>
- Jaya, A. M., Tuwo, A., & Lanuru, M. (2012). Kajian kondisi lingkungan dan perubahan sosial ekonomi reklamasi Pantai Losari dan Tanjung Bunga. *Jurnal Sains & Teknologi*, 12 (1). 46-55.
- Junaid, I., Sigala, M., & Banchit, A. (2020). Implementing community-based tourism (CBT): Lessons learnt and implications by involving students in a CBT project in Laelae Island, Indonesia. *Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education*, 29. DOI:10.1016/j.jhlste.2020.100295
- Kontogeorgopoulos, N. (2005). Community-based ecotourism in Phuket and Ao Phangnga, Thailand: Partial victories and bittersweet remedies. *Journal of sustainable tourism*, 13 (1), 4-23. DOI:10.1080/17501220508668470
- Koperasi Pemukiman & Lingkungan Hidup. (2015). *Eko Damai Mandiri*. <https://ekodamaimandirivillage.wordpress.com/2015/01/24/eko-damai-mandiri/>
- Lestari, S. F. (2019). *Gerakan Komunitas Nelayan Tradisional Muara Angke Dalam Penolakan Reklamasi Teluk Jakarta*. Tesis. Universitas Airlangga. https://repository.unair.ac.id/82210/3/JURNAL_Fis.P.24%2019%20Les%20g.pdf
- Luthfi, M. A. (2018). *Center Point of Indonesia Makassar Pada Proses Pembangunannya terhadap Masyarakat Pesisir (2009-2017)*. Tesis Universitas Negeri Makassar.
- Manaf, A., Purbasari, N., Damayanti, M., Aprilia, N., & Astuti, W. (2018). Community-based rural tourism in inter-organizational collaboration: How does it work sustainably? Lessons learned from Nglanggeran Tourism Village, Gunungkidul Regency, Yogyakarta, Indonesia. *Sustainability*, 10 (7), 2142. <https://doi.org/10.3390/su10072142>
- Newswire. (2019). *Nelayan Kembali Protes Reklamasi 'Central Poin of Indonesia'*. <https://sulawesi.bisnis.com/read/20190919/540/1150250/nelayan-kembali-protes-reklamasi-central-poin-of-indonesia>
- Pantiyasa, I. W. (2011). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bedulu, Blah Batuh, Gianyar). *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 1 (2). DOI: <https://doi.org/10.22334/jihm.v1i2.68>
- Pongponrat, K. (2011). Participatory management process in local tourism development: A case study on fisherman village on Samui Island, Thailand. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 16 (1). 57-73. DOI:10.1080/10941665.2011.539391
- Pongponrat, K., & Chantradoan, N. J. (2012). Mechanism of social capital in community tourism participatory planning in Samui Island, Thailand. *Tourismos*, 7 (1). 339-349
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York: Simon and Schuster.
- Ramadhiani, A. (2017). *Data Kiara, 107.361 KK Nelayan Terusir akibat Reklamasi*. <https://properti.kompas.com/read/2017/01/16/214941121/data.kiara.107.361.kk.nelayan.terusir.akibat.reklamas>
- Reklamasi daratan. https://id.wikipedia.org/wiki/Reklamasi_daratan
- Rocharungsat, P. (2008). Community-based Tourism in Asia. Dalam G. Moscardo. (Ed.). *Building community capacity for tourism development*. Oxfordshire: Cabi. 60-74.

- Subekti, S. Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologis di Teluk Benoa, Bali. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 3 (1). 53-67.
- Sunuantari, M. (2017). Tourism Communication in Community Based Tourism in Dieng Community, Central Java, Indonesia. *Binus Business Review*, 8 (2). 149-156.
- Van Stekelenburg, J., & Klandermans, B. (2013). The social psychology of protest. *Current Sociology*, 61 (5-6), 886-905.
- Wiranata, I. M. A. (2020). *Gerakan Warga Desa Adat di Bali Menentang Reklamasi Teluk Benoa: Studi Fenomenologi Hermeneutik Dalam Perspektif Gerakan Sosial Baru*. Tesis Universitas Airlangga Surabaya.